



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029**



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang 52319  
TELP.(0284) 321193 Fax. (0284) 321193

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Penyusunan rencana strategis ini mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, termasuk dampak perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kondisi pascapandemi. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan bersifat adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil yang terukur.

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ssebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 2029.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemalang, September 2025  
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Pemalang Kabupaten Pemalang,



Drs. MU'MINUN, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680526 199403 1 005

## DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR .....	i
DAFTAR	ISI .....	iii
SURAT	PERNYATAAN .....	iv
		Hal
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1. Latar Belakang .....	1
	2. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
	3. Maksud dan Tujuan .....	6
	4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINSOSKBPP KABUPATEN PEMALANG .....	8
	1. Gambaran Pelayanan DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang.....	8
	2. Permasalahan dan Isu Strategis DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang .....	32
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	40
	1. Tujuan Renstra DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 .....	40
	2. Sasaran Renstra DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 .....	42
	3. Strategi DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 .....	43
	4. Arah Kebijakan DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 ..	45
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	49
	1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang .....	49
	2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DINSOSKBPP Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	224
	3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	226
BAB V	PENUTUP .....	228

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Drs. MU'MINUN, M.M.

NIP 19680526 199403 1 005

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk  
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, September 2025  
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Pemalang Kabupaten Pemalang,



Drs. MU'MINUN, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680526 199403 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 217 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dibentuk dalam rangka membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hal ini selaras dengan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya, bahwa Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya merupakan institusi yang bertugas secara proaktif berperan dalam menurunkan kemiskinan, stunting, angka kelahiran, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya merupakan bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pematang Jaya terpilih yang dilaksanakan

secara simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Sosial, Renstra BKKBN dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

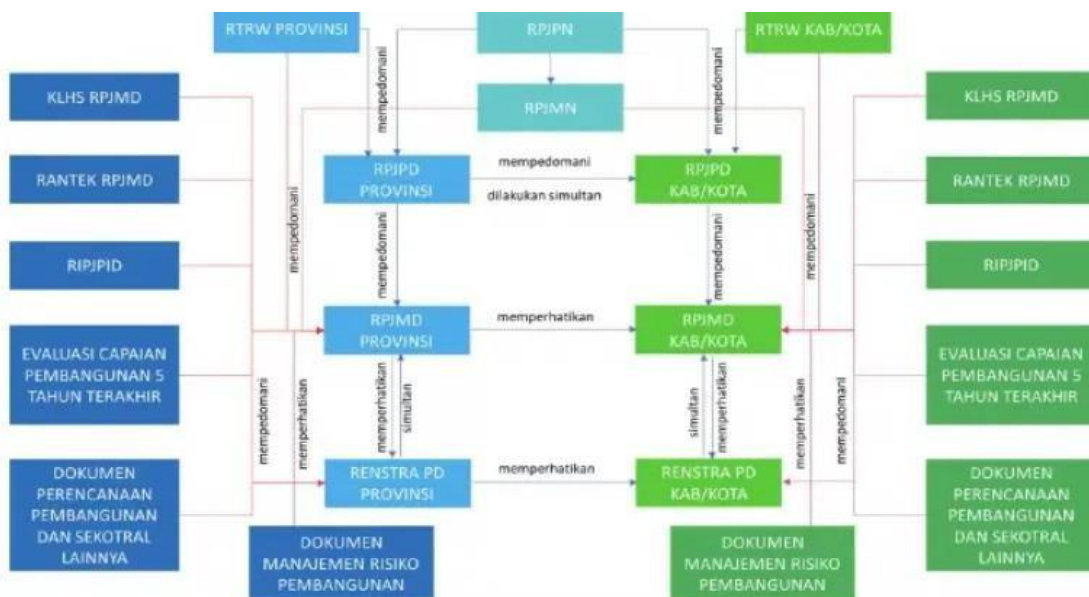
Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Forum

Perangkat Daerah; (5) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.1  
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang; (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tengah Nomor 7);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pematang;
22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pematang Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang dalam mendukung visi dan misi bupati;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah serta Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, dan Arah Kebijakan.

##### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah, termasuk indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan

##### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan DinsosKBPP Kabupaten Pemalang**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**

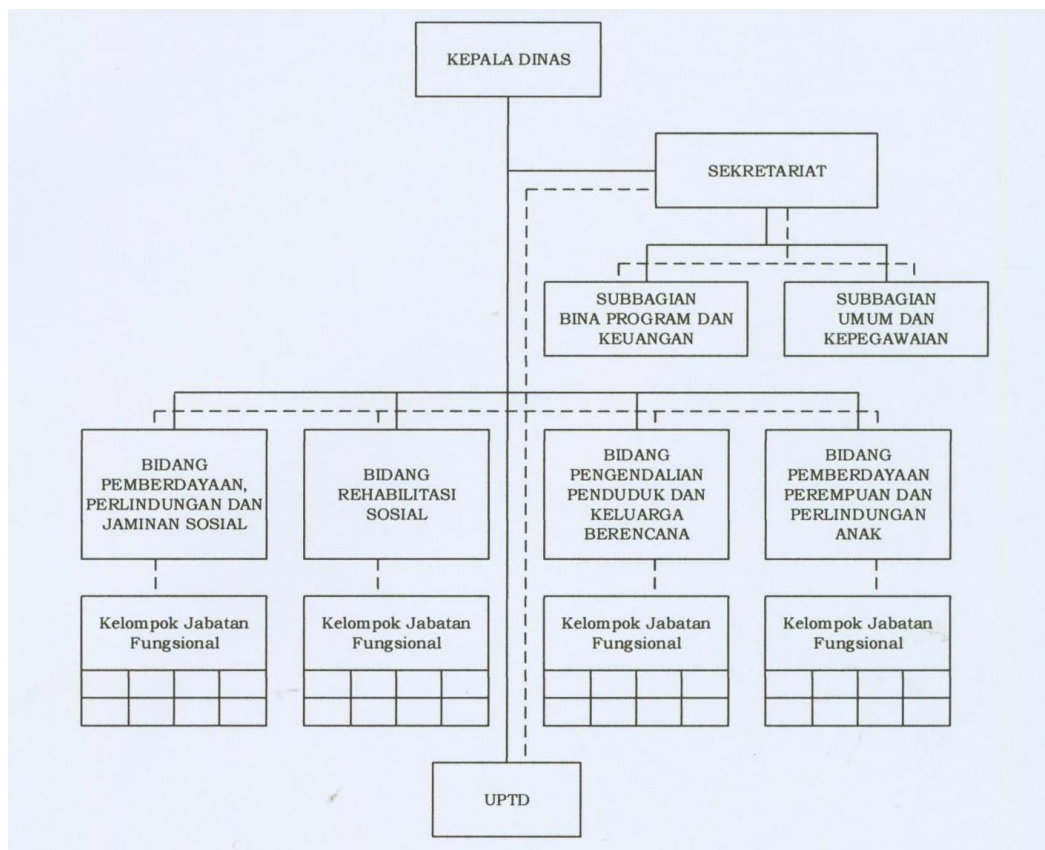
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :
  - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- g. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
- Kelompok Jabatan Fungsional
  - UPTD

**Gambar 2.1**  
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023

Sedangkan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 tahun 2023 maka uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

#### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ,
2. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. Mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. Mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Perlindungan Anak sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,

8. Mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. Merumuskan laporan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati,
10. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja, dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

## **B. Sekretaris**

Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan indikator

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
  8. Mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
  9. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
  10. Mengoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

### **C. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### **D. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Rehabilitasi Sosial guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### **E. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,

4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

**F. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. Menyusun konsep kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
4. Menyusun konsep inovasi Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan bersama Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Sumber daya Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

#### a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang administrasi kependudukan tersaji dalam tabel berikut Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

No.	Uraian	Pendidikan					Jenis Kelamin										Jumlah		
		S 2	S 1	D3	SMA	Di bawah SMA	S2		S1		D3		SMA		Di bawah SMA				
							L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	-	1	-										1	
2.	Jabatan Administrasi																		
	1. Administrator	4	-	-	-	-	3	1										3	1
	2. Pengawas	2	1	-	-	-	1	1		1								1	2
	3. Pelaksana	1	13	2	3	-	1		4	9	1	1	3					9	10
3.	Jabatan Fungsional	2	3	1	-	-		2	1	2	1							2	4
4.	Non ASN		20	5	17	4			11	9	1	4	14	3	3	1		2	17
	Jumlah	10	37	8	20	4	6	4	16	21	3	5	17	3	3	1		45	34

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, Juni 2025 (diolah)

Dukungan SDM Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang secara total per Juni 2025 adalah 33 orang PNS dan 46 orang tenaga bantu Honorer.

Proporsi gender di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang masih didominasi yaitu jumlah pegawai laki - laki 45 orang (56,96%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 34 orang (43,04%). Dalam Kategori Pendidikan Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dipetakan S2 (10 orang, 12,66%), diikuti dengan S1 (37 orang, 46,83%), DIII (8 orang, 10,13%), SLTA/ sederajat (20 orang, 25,32%), dibawah SLTA (4 orang, 5,06%), dan paling sedikit dibawah SLTA yaitu sejumlah 4 orang (5,06%).

Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang.

Nilai Aset di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.612.553.498 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
	<b>ALAT BESAR</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
1	- electric generating set lainnya (dst)	B		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
	<b>KOMPUTER</b>	<b>B</b>		<b>278</b>
2	- P.C Unit	B		59
3	- Lap Top	B		75
4	- Note Book	B		10
5	- Hard Disk	B		3
6	- Monitor	B		2
7	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	B		119
8	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	B		2
9	- Peralatan Personal Komputer lainnya	B		6
10	- Modem	B		2
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>B</b>		<b>122</b>
11	- Station Wagon	B		6
12	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	B		2
13	- Pick Up	B		2
14	- Sepeda Motor	B		110
15	- Mobil Unit Penerangan Darat	B		2
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>B</b>		<b>1</b>
16	- perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	B		1
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>B</b>		<b>940</b>
17	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	B		1
18	- Mesin Fotocopy Lainnya	B		1
19	- Lemari Besi/Metal	B		8
20	- Lemari Kayu	B		23
21	- Rak Besi	B		4
22	- Rak Kayu	B		14
23	- Filing Cabinet Besi	B		21
24	- Brandkas	B		2
25	- Lemari Kaca	B		2
26	- Papan Visual/Papan Nama	B		6
27	- White Board	B		18
28	- Alat Penghancur Kertas	B		2
29	- Mesin Absensi	B		2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
30	- Alat Pemotong Kertas	B		1
31	- LCD Projector/Infocus	B		12
32	- Papan Nama Instansi	B		2
33	- Alat Kantor Lainnya	B		65
34	- Kursi Besi/Metal	B		100
35	- Kursi Kayu	B		26
36	- Meja Rapat	B		29
37	- Meja 1/2 Biro	B		63
38	- Kursi Rapat	B		83
39	- Kursi Tamu	B		4
40	- Kursi Putar	B		6
41	- Kursi Biasa	B		5
42	- Bangku Tunggu	B		6
43	- Kursi Lipat	B		95
44	- Meja Komputer	B		1
45	- Sofa	B		2
46	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	B		5
47	- Alat Pembersih lainnya	B		6
48	- Lemari Es	B		3
49	- A.C. Window	B		10
50	- A.C. Split	B		28
51	- Kipas Angin	B		35
52	- Exhaust Fan	B		23
53	- Kompor Gas (Alat Dapur)	B		2
54	- Tabung Gas	B		2
55	- Televisi	B		5
56	- Wireless	B		3
57	- Camera Video	B		2
58	- Dispenser	B		8
59	- Mimbar/Podium	B		1
60	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	B		44
61	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	B		5
62	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	B		1
63	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	B		4
64	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B		12
65	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B		58

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik (B)	Rusak (R)	
66	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	B		2
67	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	B		2
68	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B		7
69	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B		25
70	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	B		40
71	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B		1
72	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	B		2
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>B</b>		<b>234</b>
73	- peralatan studio audio lainnya (dst)	B		1
74	- Camera Electronic	B		7
75	- Video Monitor	B		3
76	- Slide Projector	B		1
77	- Camera Film	B		1
78	- Layar Film/Projector	B		97
79	- peralatan studio gambar lainnya (dst)	B		1
80	- Telephone Mobile	B		120
81	- Facsimile	B		1
82	- Publik Address (Lapangan)	B		2
	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	<b>B</b>		<b>40</b>
83	- Alat Kesehatan Umum lainnya	B		40
<b>JUMLAH</b>				<b>1.616</b>

Sumber : *Buku Rekapitulasi Inventaris Tahun 2024*

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Siang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 1 (satu) aula, mushola, gudang, ruang tamu, ruang ramah anak, toilet ramah gender di masing – masing bidang, namun belum memiliki ruang laktasi maupun toilet untuk disabilitas. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio Personal Computer dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada

di kantor induk mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
						2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>TUJUAN PD</b>																	
1	Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai				NA	82	83	84	85	88,86	83,47	85,96	86,27	108,37	100,57	102,33	101,49
2	Persentase PMKS yang ditangani	%				10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	62,69	44,58	74,22	66,6	491,30	290,99	415,33	326,15
3	IDG (Indek Pemberdayaan Gender)	Nilai				80,95	85,93	86,03	86,13	86,23	81,27	81,57	-	-	94,58	94,82	0,00	0,00
4	TFR	Angka				2,51	2,5	2,49	2,48	2,47	2,51	2,48	2,23	2,23	99,60	100,40	110,08	109,72
5	IPG					NA	82	83	84	85	86,49	86,72	87,14	87,37	105,48	104,48	103,74	102,79
6	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)					10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	62,69	44,58	74,22	66,6	491,30	290,99	415,33	326,15
<b>B.</b>	<b>SASARAN PD</b>																	
1	Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
2	Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	%				NA	41,06	49,27	57,48	65,7	65,96	64,29	37,44	30,93	160,64	130,49	65,14	47,08
3	Indeks PUG	Nilai				NA	0,79	0,8	0,81	0,82	0,8		0,81		101,27	0,00	100,00	0,00
4	Indeks KLA	Nilai				NA	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Nindya	Nindya
5	ASFR (15-19 tahun)	Angka				NA	35	35	34	34	35	21,2	21,8	21,2	100,00	139,43	135,88	137,65
6	IKG (indek ketimpangan gender)					0,370					0,441	0,425	0,378	0,380				
7	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)										55,37	58,34	62,08	62,77				
8	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)					-					-	-	-	64,3				

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
9	Indeks Pencapaian SPM Sosial										100,00	100,00	100,00	100,00				
10	Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya										100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>C.</b>	<b>PROGRAM</b>																	
1	Nilai SAKIP	Nilai				NA	60	60,3	60,5	61	58,65	60,4	63,15	65,36	97,75	100,17	104,38	107,15
2	Nilai IRB	Nilai				NA	60	60,3	61	61,3	53,17	45,73	-	-	88,62	75,84	0,00	0,00
3	Persentase PSKS yang diberdayakan	%				NA	20,24	24,09	28,1	32,11	20,24	9,38	68,23	32,11	100,00	38,94	242,81	100,00
4	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%				NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	%		V		17	17	34	51	68	100,00	100,00	100,00	100,00	588,24	294,12	196,08	147,06

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
	serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi																	
6	Persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2	%				NA	28,46	28,47	28,48	28,49	28,46	28,07	27,53	28,49	100,00	98,60	96,66	100,00
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%		V		85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.	%				NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
9	Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	%				NA	35	35	35	34	35	4,5	25,85		100,00	12,86	73,86	0,00
10	Angka Prevalensi Modern CPRm	%				NA	22,48	22,5	23	23,3	22,5	69,48	70,11	71,05	100,09	308,80	304,83	304,94
11	Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan	%				NA	85,21	85,48	85,75	85,94	85,21	85,48	85,75	85,94	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%		V		NA	5	5,2	5,4	5,4	5	2,52	2,7	5,24	100,00	48,46	50,00	97,04
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%		V		NA	0,13	0,12	0,11	0,1	0,13	0,011	0,011	0,002	100,00	190,83	190,00	198,00
14	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%		V		NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Base Line	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Renstra Perangkat Daerah				Rasio Capaian Tahun 2021 s/d Tahun 2024 (%)			
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
15	ASFR (15-49) tahun	%		V		NA	35	35	34	34	35	21,2	21,8	21,2	100,00	139,43	135,88	137,65
16	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%		V		NA	22,48	22,5	23	23,3	22,48	69,57	70,11	70,75	100,00	309,20	304,83	303,65
17	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		V		NA	10,12	10,1	10,09	10,08	10,1	10,66	10,27	9,78	100,20	94,46	98,22	102,98

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 26 kinerja terdapat 23 kinerja telah mencapai target dan 3 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024 karena Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang semakin ditingkatkan dan Inovasi dalam meningkatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Partisipasi, dukungan masyarakat terhadap program-program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang meliputi :
  - a. Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)
  - b. Persentase PMKS yang ditangani
  - c. IDG (Indek Pemberdayaan Gender)
  - d. Persentase penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
  - e. Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial
  - f. Indeks PUG
  - g. Indeks KLA
  - h. ASFR (15-19 tahun)
  - i. Nilai SAKIP
  - j. Nilai IRB
  - k. Persentase PSKS yang diberdayakan
  - l. Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani
  - m. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang di rehabilitasi
  - n. Persentase pemberinan jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di Tingkat kesejahteraan 1 dan 2
  - o. Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani
  - p. Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.
  - q. Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun
  - r. Angka Prevalensi Modern CPRm
  - s. Cakupan PUS yang ber KB yang di berdayakan
  - t. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
  - u. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

- v. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
  - w. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)
  - x. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
2. Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
- a. IDG (Indek Pemberdayaan Gender) tidak mencapai target disebabkan Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dan Eksekutif, Kesenjangan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Formal, Angka partisipasi perempuan di pendidikan tinggi tertinggal di beberapa wilayah, terutama di daerah tertinggal dan pedesaan, Kekerasan terhadap Perempuan dan Diskriminasi dan Kelemahan Koordinasi dan Komitmen Lintas Sektor.
  - b. Persentase Penduduk pada Tingkat Kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan sosial, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial tidak mencapai target disebabkan oleh Basis Data Tidak Akurat atau Tidak Terkini, Penduduk Rentan Tidak Terjangkau oleh Program, Minimnya Anggaran dan Sumber Daya dan Lemahnya Koordinasi Antarsektor dan Antara Pemerintah Pusat-Daerah
  - c. Nilai IRB tidak mencapai target disebabkan Roadmap reformasi birokrasi tidak diimplementasikan secara nyata, Sasaran dan indikator kinerja belum SMART, SOP belum diterapkan secara konsisten, Belum optimalnya pelaksanaan merit system (rekrutmen, mutasi, promosi berbasis kinerja), Inovasi layanan masih minim dan Pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan integritas belum dijalankan maksimal
  - d. Persentase PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun tidak mencapai target disebabkan Masih Tingginya Perkawinan Usia Anak, Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah cenderung lebih cepat menikah dan masuk usia subur lebih awal, Remaja dan orang tua kurang mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan risiko menikah muda, PUS dengan istri usia <20 tahun sering tidak mendapatkan konseling KB atau akses kontrasepsi karena dianggap belum cukup umur atau tabu, dan Lemahnya kolaborasi antara sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kependudukan.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Berdasarkan Renstra Tahun 2021 – 2024**

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
		36.715.002.000	34.858.060.000	34.938.000.000	35.023.000.000	29.095.587.705	32.535.112.969	31.100.819.840	37.972.973.376	79,25	93,34	89,02	108,42	-1,21%	0,17%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.567.400	4.706.000.000	4.706.000.000	4.706.000.000		4.944.996.499	4.451.073.870	4.881.959.826	0,00	105,08	94,58	103,74	-5,00%	0,00%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	715.646.300	720.000.000	725.000.000	730.000.000	430.777.800,00	616.326.500	382.586.600	641.772.648	60,19	85,60	52,77	87,91	0,49%	0,51%
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	6.000.000	15.000.000	20.000.000	300.000,00	3.638.900	300.000	0	6,00	60,65	2,00	0,00	25,42%	21,25%
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	961.526.500	1.152.560.000	1.155.000.000	1.155.000.000	649.896.654,00	906.634.302	1.005.680.987	9.208.878.766	67,59	78,66	87,07	797,31	4,20%	0,16%
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.295.199.900	13.300.000.000	13.305.000.000	13.310.000.000	10.453.727.900,00	8.401.975.900	5.573.105.080	4.030.315.500	78,63	63,17	41,89	30,28	0,03%	0,03%
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	209.691.900	210.000.000	215.000.000	220.000.000	193.840.800,00	128.933.700	62.369.600	38.895.000	92,44	61,40	29,01	17,68	1,19%	1,71%

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp					
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	67.845.900	100.000.000	105.000.000	110.000.000	32.272.800,00	40.974.500	34.903.600	33.915.000	47,57	40,97	33,24	30,83	10,37%	3,41%
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	737.492.000	650.000.000	650.000.000	675.000.000	543.710.000,00	264.486.000	229.511.000	839.977.883	73,72	40,69	35,31	124,44	-2,44%	1,11%
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.014.881.100	815.000.000	820.000.000	825.000.000	877.513.739,00	183.787.861	124.763.405	335.164.495	86,46	22,55	15,22	40,63	-5,83%	0,30%
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	145.000.000	141.500.000	150.000.000	150.000.000	80.607.000,00	168.544.000	144.684.742	436.557.108	55,59	119,11	96,46	291,04	0,80%	2,98%
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	55.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	30.713.000,00	49.982.100	19.000.000	14.450.000	55,84	66,64	23,75	17,00	9,70%	4,42%
12	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	148.825.000	160.000.000	170.000.000	175.000.000	74.691.200,00	155.919.000	115.359.000	383.536.480	50,19	97,45	67,86	219,16	3,93%	2,88%
13	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	151.175.000	170.000.000	175.000.000	180.000.000	78.592.000	106.897.000	66.655.500	146.578.092	51,99	62,88	38,09	81,43	4,18%	2,08%
14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	948.048.300	2.330.000.000	2.335.000.000	2.340.000.000	693.248.000,00	657.117.000	10.658.074.394	9.633.381.540	73,12	28,20	456,45	411,68	14,93%	0,16%

NO.	URAIAN	PAGU INDIKATIF PD PADA TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN Tahun KE-				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024					ANGGARAN	REALISASI
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	2021	2022	2023	2024		
15	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.481.750.400	8.000.000.000	8.005.000.000	8.010.000.000	8.012.278.642,00	13.071.969.928	5.222.769.000	3.163.632.000	84,50	163,40	65,24	39,50	-4,60%	0,05%
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.100.182.300	1.050.000.000	1.055.000.000	1.060.000.000	768.500.300,00	1.043.622.900	1.627.029.500	1.574.434.700	69,85	99,39	154,22	148,53	-0,96%	0,35%

**2.1. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang**

**2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih adanya kesenjangan gender di bidang kehidupan	Belum optimalnya implementasi kebijakan PUG
			Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di OPD
			Masih terdapat ketimpangan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik dan ekonomi yang menjadi indikator pembangunan gender
			Belum optimalnya kualitas dan kuantitas data dan informasi pilah gender diberbagai level

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih rendahnya proporsi belanja anggaran responsif gender dibanding total pagu yang ada baik di perangkat daerah maupun APBD secara keseluruhan
2	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak di daerah	Komitmen pengambil kebijakan di daerah masih kurang	<p>Belum semua stakeholder (OPD) paham terkait regulasi Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <p>Implementasi Pengarusutamaan hak anak belum menjadi isu prioritas dan strategis bagi Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha</p> <p>Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan di berbagai level mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Belum adanya sistem pelibatan anak dalam forum pengambilan keputusan secara berjenjang dan integratif</p>
4	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Semakin banyaknya jenis kasus kekerasan dan perundungan perempuan dan anak	Sebagian besar Layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak di daerah masih terpusat pada level Kabupaten/Kota
			<p>Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas sektor</p> <p>Belum optimalnya implementasi sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di daerah</p> <p>Belum optimalnya perlindungan bagi anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan resiko</p> <p>Belum optimalnya sinergitas Lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum memadai sarana dan prasarana UPTD PPA serta masih terbatasnya kapasitas SDM penyedia layanan yang ada</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya pembangunan kependudukan di daerah	Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dan mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan	Belum optimalnya advokasi pemanfaatan GDPK 5 pilar di Kabupaten/Kota
			Masih rendahnya komitmen pengambil kebijakan di Kabupaten/ Kota untuk menyusun GDPK 5 pilar
			Belum semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK membentuk Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
6	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Masih rendahnya kepesertaan KB MKJP.	Kurangnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat karena keterbatasan jumlah tenaga penyuluh KB dilapangan,
			Masih terbatasnya layanan KB gratis bagi masyarakat kurang mampu terutama didaerah pedesaan atau terpencil
			Kurangnya motivasi dan ketrampilan Kader PPKBD, Sub PPKBD dalam memberikan KIE KB
7	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Masih kurangnya peran aktif kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) dalam membina anggota kelompoknya	Advokasi dan pendampingan bagi kader kelompok Tribina (BKB, BKL dan BKR) belum optimal
8	Belum optimalnya peran kader dan kelompok UPPKA dalam mendorong peningkatan pendapatan keluarga keluarga	Masih rendahnya kapasitas kader dan anggota kelompok UPPKA dalam menciptakan wirausaha mandiri	Masih rendahnya pelatihan ketrampilan ekonomi kader dan anggota UPPKA, terbatasnya akses sumber permodalan, kualitas produksi pemasaran dan kemasan produk hasil anggota UPPKA masih belum optimal
9	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, informasi layanan publik dan keuangan perangkat daerah
10	Penanganan Sosial PPKS Belum Optimal	Rehabilitasi Sosial PPKS Belum Memenuhi Standar Kualitas SPM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Sarpras Rumah Singgah Belum Memadai</li> <li>2. Kompetensi SDM Rumah Singgah Belum Memadai</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemenuhan Kebutuhan Dasar PM Panti Belum Memadai
		Belum Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi PPKS Yang Layak dan Tepat Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Sasaran Penanganan PPKS Tersedia Belum Valid</li> <li>2. Pendampingan Sosial Belum Optimal</li> </ol>
		Belum Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Saat dan pascaTanggap Darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Tercukupinya Pemenuhan Logistik Bencana</li> <li>2. Belum Optimalnya Pendampingan Psikososial</li> <li>3. Kurangnya Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan</li> </ol>
		Kurangnya Kemandirian Sosial PPKS Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Data Sasaran Program PPKS Tersedia Belum Valid</li> <li>2. Konsistensi Pendampingan PPKS Belum Optimal</li> </ol> <p>PPKS Belum Mampu Mengelola Bantuan Dengan Baik</p>
		Kurangnya Peran Serta PSKS Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarpras Operasional Belum Memadai</li> <li>2. Bimbingan Teknis Pekerjaan Sosial Bagi PSKS Belum Optimal</li> <li>3. Kurangnya Kemitraan dengan Dunia Usaha</li> <li>4. Kurangnya peran serta pihak luar dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan serta Kesetiakawan Sosial</li> </ol>

### 2.1.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Siantar dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional sebagai berikut :

1. Masih tingginya ketimpangan gender
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Masih tingginya angka kelahiran
4. Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga
5. Belum optimalnya PPKS yang ditangani

Tabel 2.6  
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PUSPAGA	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan	Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Masih tingginya ketimpangan gender
UPTD	Belum optimalnya implementasi pemenuhan hak anak di daerah	Belum meratanya akses pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia	Perlindungan dari kekerasan terhadap anak, serta akses yang sama terhadap keadilan.	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						perempuan dan anak
	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan gender dan hak-hak anak	Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak	Kekerasan terhadap perempuan serta menghindari perkawinan usia anak	Pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender	
GDPK	Masih rendahnya Kepesertaan KB Pasangan Usia Subur	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	TFR pada beberapa negara maju di Dunia	TFR di Indonesia	TFR di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Tengah	Masih tingginya angka kelahiran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
SEKOLAH LANSIA	Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) dalam mendukung peningkatan Ketahanan Keluarga.	Belum optimalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif	Pembangunan dan Kualitas Ketahanan Keluarga	Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk.	Peran dan fungsi dari Kelompok Tribina yang telah terbentuk.	Belum Optimalnya Kualitas Ketahanan Keluarga
Rumah Singgah	Belum Optimalnya Penanganan Sosial PPKS	Masih tingginya kemiskinan pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak, kaum marginal dan difabel Kaum Perempuan merupakan kaum rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim	Penanganan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga	Belum optimalnya PPKS yang ditangani

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pemalang dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “**PEMALANG BERCAHAYA (Bersih, Cakap, Handal dan Mulya)**”.

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2025-2029. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya, Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan
2. **Cakap** dimaknai memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.
4. **MULYA** Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk

mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.

Misi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi, antara lain: mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi, mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan ke dalam satu kesatuan yang utuh, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka mencapai visi, berikut ini misi RPJMD 2025-2029 berdasarkan misi Kepala Daerah Kabupaten Pemalang yang terpilih yaitu **RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi dan Ikhlas)**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih
2. **Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yg berkelanjutan
3. **Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah
4. **Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat
5. **Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera
6. **Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi
7. **Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar
8. **Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung pencapaian Visi Ke-2 "**Cakap**" dan Visi Ke-4 "**Mulya**" sedangkan untuk misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-4 "Peduli"** dan **Misi ke-5 "Silaturahmi"** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang adalah:

1. Tujuan ke-3 "**Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan**"
2. Tujuan ke-4 "**Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat**"

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang mempunyai 4 (empat) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

1. **“Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS ”** yang diukur dengan indikator Persentase PPKS yang ditangani, merupakan ukuran pencapaian SPM Sosial dan KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan hasil dari bentuk Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang kepada masyarakat penerima manfaat.
2. **“Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak”** yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
  - **IKG (indek ketimpangan gender)** dan **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana IKG (indek ketimpangan gender)** merupakan ukuran yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja.

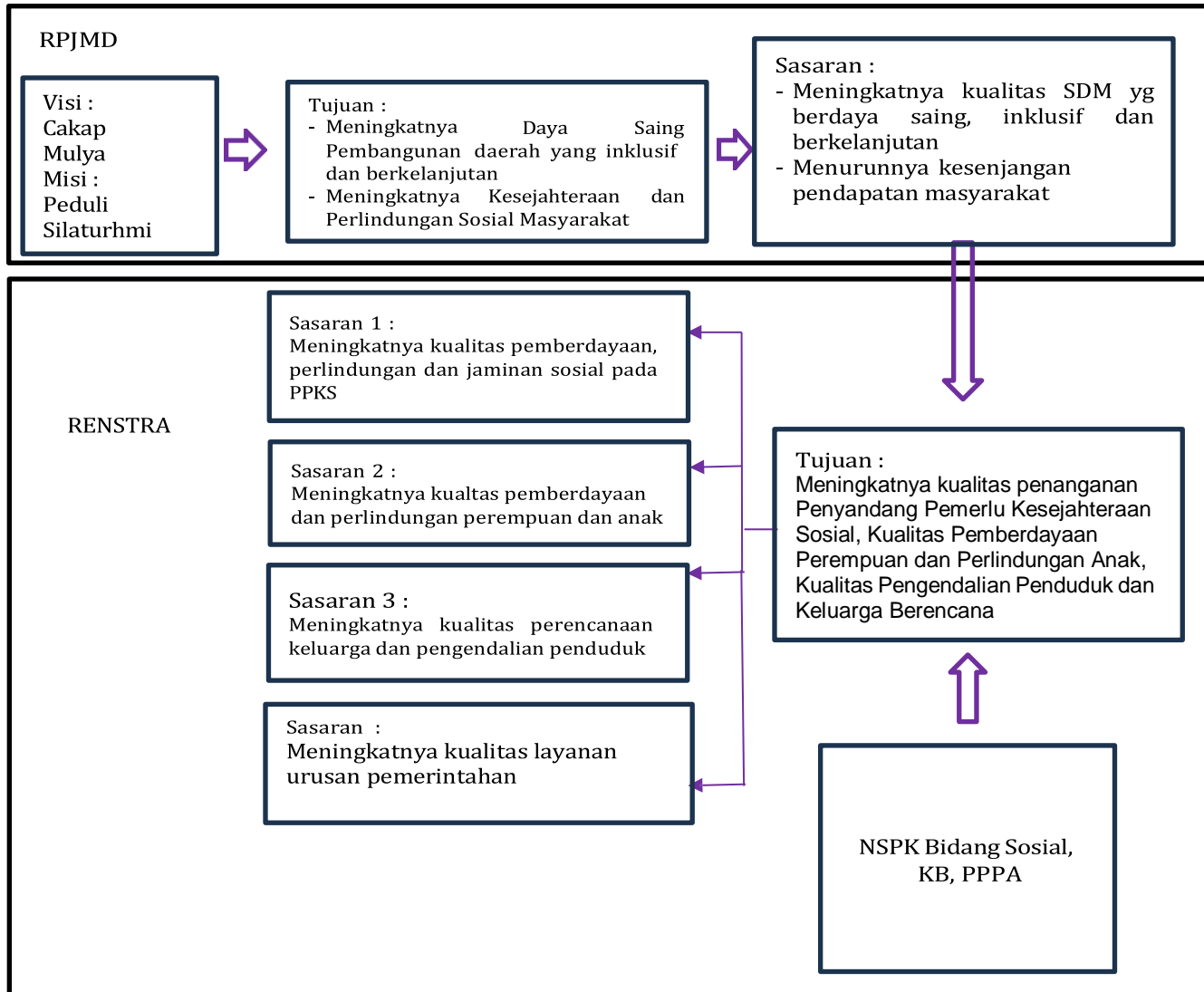
- **Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** adalah penilaian yang mengacu pada sistem pembangunan berbasis hak anak, yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. KLA dinilai berdasarkan 31 indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak. Bahwa setiap anak di suatu wilayah mendapatkan hak-haknya terpenuhi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3. **“Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk”** yang diukur dengan indikator sebagai berikut :
- **TFR (Angka Kelahiran Total), Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) dan IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)**, dimana **TFR** merupakan indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya usia 15-49 tahun) jika ia hidup hingga akhir masa subur dan mengikuti pola kelahiran saat ini. TFR yang tinggi dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang pesat, sedangkan TFR yang rendah dapat menunjukkan pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan penurunan.
  - **IBangga** merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas keluarga di Indonesia. Indeks ini mengukur tiga dimensi utama yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang masing-masing diwakili oleh beberapa indikator dan variabel.
  - **IPBK** adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah memperhatikan aspek kependudukan. IPBK menjadi indikator untuk melihat integrasi isu kependudukan, seperti pertumbuhan, persebaran, kualitas, dan mobilitas penduduk, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kata lain, IPBK mencerminkan bagaimana penduduk menjadi fokus utama, baik sebagai subjek maupun objek, dalam proses pembangunan. IPBK mengukur lima dimensi pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu:
    - a. Partisipasi: Seberapa besar penduduk terlibat dalam proses pembangunan.
    - b. Keberlanjutan: Sejauh mana pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya kependudukan.
    - c. Pemihakan: Seberapa besar pembangunan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

- d. Integrasi: Sejauh mana isu kependudukan terintegrasi dalam berbagai sektor pembangunan.
- e. Kesetaraan: Sejauh mana pembangunan memberikan kesempatan yang sama bagi semua penduduk.

IPBK juga berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPBK, yang berarti pembangunan yang lebih berwawasan kependudukan, diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM, yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

4. **“Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		% PPKS yang ditangani	%	68	70	72	73	75	75	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100	100	100	100	100	100	
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,00	86,05	86,10	86,15	86,20	86,25	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas SDM yg berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		IPG	Indeks	87,45	87,5	87,55	87,6	87,65	87,7	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,380	0,390	0,380	0,370	0,360	0,350	
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (850)	Utama (880)	Utama (900)	
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,23	1,22	1,21	1,2	1,19	1,18	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62	64	66	68	70	72	
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,1	65,9	66,7	67,5	68,3	69,1	

### **3.3 Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam manajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
  - a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

- b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
- a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;
  - b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan, alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;
  - c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;
  - d. Memperkuat implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;
  - e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;
  - f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;
  - g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;
  - h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
- a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat

kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
- a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Selanjutnya pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pentahapan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kesadaran pentingnya pencegahan perkawinan anak/perkawinan minimal 19 tahun serta edukasi kepada Calon Pengantin (Catin)	Mendorong Komitmen Kabupaten dalam Implementasi Kecamatan Berdaya, Kampung KB Mandiri dan berkelanjutan serta bersinergi dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	Peningkatan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS	Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kualitas Penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### **3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang

memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Pelaksanaan Program Kerja</li> <li>2. Advokasi dan penggerakan program KB kepada masyarakat</li> <li>3. Standar pelayanan KB yang berkualitas</li> <li>4. Pembinaan terhadap peserta KB</li> <li>5. Pedoman dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program KB</li> <li>6. Penyuluhan dan Penggerakan</li> <li>7. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan</li> </ol>	<p>Peningkatan Pengendalian penduduk untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber KB dan kualitas keluarga sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun)</li> <li>2. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)</li> <li>3. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan</li> <li>4. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga</li> </ol>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pelaksanaan perlindungan anak</li> <li>2. Pemberdayaan Perempuan</li> <li>3. Pengarusutamaan Gender</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>5. Penguatan Kelembagaan</li> </ol>	<p>Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak difokuskan pada perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak</li> <li>2. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan</li> <li>3. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)</li> <li>4. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis</li> <li>5. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan</li> <li>6. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah</li> </ol>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan 7. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor	
3	1. Penyusunan SOP Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan korban penyalahgunaan narkoba 2. Penyusunan SOP pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya 3. Pemberdayaan Masyarakat 4. Penyusunan SOP Pelayanan sosial, baik di dalam maupun di luar panti, untuk lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas	Peningkatan penanganan PPKS melalui jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi, kerjasama intervensi lintas sektor dan swasta dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS 2. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder 3. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik,	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>sistematis dan terstandar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS</li> <li>6. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan penanganan khusus kelompok rentan</li> <li>7. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</li> <li>8. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN)</li> <li>9. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel</li> <li>10. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas</li> </ol>	

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	<p>a. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);</p> <p>b. Meningkatkan penanganan PPKS melalui peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik PSKS, LKS, LK3, pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BST) peningkatan kualitas data kemiskinan (DTSEN), penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permensos 6 tahun 2019, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rahabilitasi Sosial, dan perbaikan taman makam pahlawan.</p>	<p>a. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dalam upaya peningkatan sustainable livelihood bagi PPKS</p> <p>b. Meningkatkan kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Peningkatan Koordinasi antar stakeholder</p> <p>c. Pemberdayaan PPKS melalui bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan stimulant</p> <p>d. Peningkatan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi PPKS dalam Panti (Pemerintah dan Swasta) secara holistik, sistematis dan terstandar</p> <p>e. Meningkatkan kualitas penyaluran Bantuan Jaminan Sosial yang tepat sasaran dalam upaya pemenuhan Basic Need Access bagi PPKS</p> <p>f. Peningkatan penanganan korban bencana melalui penyediaan logistik bencana yang memadai, pendampingan psikososial dan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>penanganan khusus kelompok rentan</p> <p>g. Peningkatan peran serta masyarakat /PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</p> <p>h. Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (DTSEN)</p> <p>i. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel</p> <p>j. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas</p>
	<p>Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak</p>	<p>a. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial hukum dan politik, perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO dengan memperkuat ketahanan keluarga dan pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan, peningkatan pemahaman masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan;</p> <p>b. Peningkatan pemenuhan hak anak melalui peningkatan kebutuhan anak bidang pendidikan, kesehatan,</p>	<p>a. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak</p> <p>b. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan</p> <p>c. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)</p> <p>d. Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis</p> <p>e. Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>alternatif bermain, penguatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak, perlindungan anak dari korban kekerasan dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus;</p> <p>c. Mendorong Kecamatan Berdaya di Kabupaten Pemalang;</p> <p>d. Memperkuat implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan;</p> <p>e. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO;</p> <p>f. Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan</p>	<p>perempuan melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan</p> <p>f. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kecamatan</p> <p>g. Penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor</p>

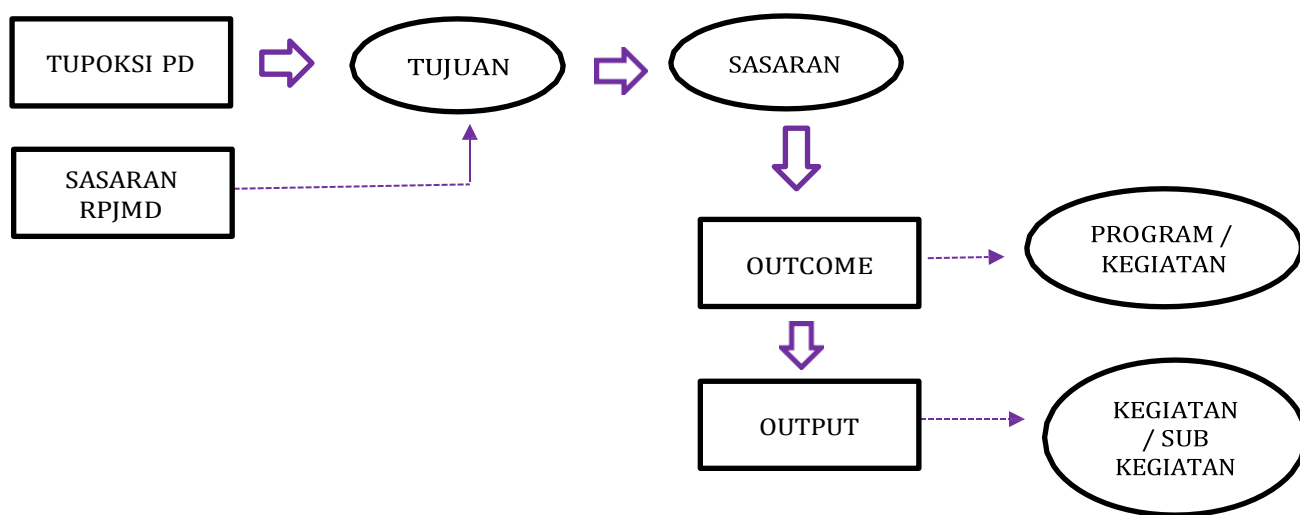
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO;</p> <p>g. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor;</p> <p>h. Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	
	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	<p>a. Pengendalian penduduk dan peningkatan pelayanan keluarga berencana melalui penyusunan grand desain kependudukan, implementasi kebijakan dengan advokasi, penetapan generasi remaja yang sehat, peningkatan usia perkawinan, peningkatan KIE. pemberian alat kontrasepsi pada PUS yang telah memiliki anak lebih dari 2 dan PUS yang memiliki resiko tinggi, peningkatan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan kelembagaan BKB, BKR dan BKL</p>	<p>a. Menyusun Kebijakan Kependudukan GDPK (5 Tahun)</p> <p>b. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)</p> <p>c. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan</p> <p>d. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga</p> <p>e. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga</p>
	Meningkatnya kualitas layanan Urusan Pemerintahan	<p>a. Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi memperbaiki</p>	<p>a. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.</p>	<p>dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel</p> <p>b. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas</p>

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa *outcome* yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 4.1**  
**Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**

Rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

**A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.5 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
- 1.6 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- 1.7 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 1.8 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.9 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.10 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
- 1.11 Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 1.12 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
  - 2.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
3. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
  - 3.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
4. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
  - 4.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
5. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota
  - 5.1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
  - 5.2 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
  - 5.3 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber

Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

6. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
    - 6.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  7. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah
    - 7.1 Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- B. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
    - 1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
  2. Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
    - 2.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
  3. Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
    - 3.1 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
- C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
    - 1.1 Penyediaan Permakanan
    - 1.2 Penyediaan Sandang
    - 1.3 Penyediaan Alat Bantu
    - 1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
    - 1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    - 1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
    - 1.7 **Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak**
    - 1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
    - 1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
    - 1.10 Pemberian Layanan Kedaruratan
    - 1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
    - 1.12 Pemberian Layanan Rujukan

- 1.13 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.14 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis
- 1.15 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- 1.16 Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- 1.17 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial
- 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - 2.1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - 2.2 Pemberian Layanan Kedaruratan
  - 2.3 Penyediaan Permakanan
  - 2.4 Penyediaan Sandang
  - 2.5 Penyediaan Alat Bantu
  - 2.6 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
  - 2.7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - 2.8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  - 2.9 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
  - 2.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - 2.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
  - 2.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - 2.13 Pemberian Layanan Rujukan
  - 2.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
  - 2.15 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - 2.16 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
  - 2.17 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya

#### D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

##### 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- 1.1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 1.2 Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 1.3 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- 1.4 Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.2 **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
  - 2.4 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  - 2.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.6 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin
  - 2.7 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota
3. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP
  - 3.1 Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial

#### E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - 1.1 Penyediaan Makanan
  - 1.2 Penyediaan Sandang
  - 1.3 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
  - 1.4 Pelayanan Dukungan Psikososial
  - 1.5 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - 2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  - 2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
  - 2.3 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
  - 2.4 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
  - 2.5 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
  - 2.6 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
  - 2.7 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana

- 2.8 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
- 2.9 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
- 2.10 Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial
- 2.11 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
- 3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - 3.1 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana

#### F. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 1.4 Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - 1.5 Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

#### G. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 3.1 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 6.3 Pengadaan Mebel
  - 6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 6.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 6.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 8.3 Pemeliharaan Mebel
  - 8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya

## H. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - 1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.3 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG**
  - 1.4 **Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG**
  - 1.5 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota**
  - 1.6 **Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota**
  - 1.7 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.8 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.10 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.11 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
  - 2.2 Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.3 Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.5 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.6 Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi

Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3.1 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 3.2 **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 3.3 **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 3.4 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3.5 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3.7 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi
  - 3.8 Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.

I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
  - 1.2 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.3 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.4 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.5 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
  - 1.6 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.7 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada,

- RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 2.1 **Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 2.2 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 2.3 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.4 Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.5 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.6 Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.7 Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota
    - 2.8 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.9 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 3.1 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 3.2 **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 3.3 **Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 3.4 **Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 3.5 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3.7 Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
    - 3.8 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  
3.9 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan  
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

J. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.2 **Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.3 **Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.4 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
  - 1.5 Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.6 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - 1.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.2 **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.3 **Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.4 Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.5 Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.6 Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.7 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  
2.8 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.1 **Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
  - 3.2 Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
  - 3.3 Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota
  - 3.4 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
  - 3.5 Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
  - 3.6 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota

#### K. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 **Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.2 **Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.3 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
  - 1.4 Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
  - 1.5 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA

#### L. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.1 **Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.2 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 1.3 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan

- Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 1.4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.5 Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.1 **Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
  - 2.2 **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.3 **Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.4 **Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - 2.5 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.6 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.7 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.8 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2.9 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

#### M. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1 **Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk**

- mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA
- 1.2 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
  - 1.3 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
  - 1.4 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
  - 1.5 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.6 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.7 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.8 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 1.9 Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 2.2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
    - 2.3 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.4 Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.5 Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.6 Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.7 Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.8 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.9 Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
    - 2.10 Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
  3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota
- 3.2 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
- 3.3 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota
- 3.4 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
- 3.5 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
- 3.6 Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
- 3.7 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.8 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.9 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3.10 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai
- 3.11 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### N. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - 1.1 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
  - 1.2 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB

#### O. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - 1.1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - 2.1 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - 3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 3.2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - 3.3 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
  - 3.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - 3.5 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  - 3.6 Peningkatan Kesertaan KB Pria
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - 4.1 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - 4.2 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

**P. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 1.1 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
  - 1.2 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
  - 1.3 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
  - 1.4 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
  - 1.5 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

- 1.6 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 1.7 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
- 1.8 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 1.9 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 1.10 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
- 1.11 Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
- 1.12 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 2.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
  - 2.2 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
  - 2.3 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
  - 2.4 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
3. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
  - 3.1 Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya

Selanjutnya, perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat (S5)	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				% PPKS yang ditangani		
		1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS			Indeks pencapaian SPM Sosial		
					% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
		2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					SAKIP		
						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	
			Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS		Persentase PSKS yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				<b>Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya</b>	<b>Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Sub Kegiatan hanya ada di

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							tahun 2025
				Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
				Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
				Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				<b>Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate</b>	<b>Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial</b>	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
				<b>Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate</b>	<b>Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	
				<b>Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Updating data SDM Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial</b>	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	<b>Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	
				Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Meningkatnya penanganan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
				Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
				<b>Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri</b>	<b>Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial</b>	<b>Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri</b>	
				Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	
			<b>Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>		<b>Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	
					<b>Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Fasilitas Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Fasilitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perumahan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Kedaruratan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Permakanan	
				Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Alat Bantu	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
				Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
				Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Layanan Rujukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
				Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			<b>Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial</b>		<b>Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</b>	<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
				Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rujukan Anak-Anak Terlantar	
				Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				<b>Terlaksananya Updating Data Fakir miskin</b>	<b>Terupdatenya Data Fakir miskin</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
				Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota Daerah	
				<b>Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</b>	<b>Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun</b>	<b>Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</b>	
				Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan <b>Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun</b>	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana pada pasca bencana		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	Penyediaan Sandang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
				Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				<b>Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
				Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
				Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
				Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	
				Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
				Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
				<b>Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	
			<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan</b>		<b>Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	
				<b>Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi		
					Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi		
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				<b>Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi</b>	<b>Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<b>Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<b>Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				IPG		
					IKG (indek ketimpangan gender)		
					Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kuitass PUG dan pemberdayaan perempuan		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
				Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
				Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	
			<b>Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan</b>		<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	
					<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangakt Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan</b>	<b>Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	
				Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>		<b>Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	
				<b>Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						<b>Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga vca dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					yang ditetapkan oleh pemerintah.		
				<b>Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			<b>Meningkatnya kualitas data pilah gender</b>		<b>Persentase OPD yang memiliki data gender</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
			<b>Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak</b>		<b>Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	
				<b>Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelebagaan PHA</b>	<b>Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelebagaan PHA</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas	Sub Kegiatan hanya ada di

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	tahun 2025
				Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya fasilitas anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	<b>Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				<b>LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)</b>		
		<b>Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk</b>			<b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>		
					<b>Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)</b>		
					<b>IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)</b>		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
					% kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)		
				Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	
			Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana		Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBPK	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				<b>Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				<b>Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
				<b>Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Sub Kegiatan hanya ada di tahun 2025
			<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera</b>		<b>% kelembagaan ketahanan keluarga aktif</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	
				<b>Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
				<b>Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</b>	<b>Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR</b>	<b>Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</b>	
				Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG						36.625.247.000		32.241.036.800		30.085.131.582		36.754.505.538		40.754.505.538		40.754.505.538		40.754.505.538	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PPKS yang ditangani	%	66,60	20.200.818.582	68,00	12.864.725.800	70,00	11.296.571.580	72,00	21.459.995.888	73,00	21.459.995.888	75,00	21.459.995.888	75,00	21.459.995.888	
	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS		Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah																		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,00		86,10		86,15		86,20		86,25		86,30		86,35		
			SAKIP	Nilai	65,00		65,10		65,15		65,20		65,25		65,30		65,35		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota				7.452.163.582		7.370.250.000		7.465.894.980		8.194.792.148		8.194.792.148		8.194.792.148		8.194.792.148	
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%	100,00	4.614.526.000	100,00	5.742.248.000	100,00	5.752.248.000	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	100,00	6.243.561.568	
			Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	%	100,00	2.837.637.582	100,00	1.628.002.000	100,00	1.713.646.980	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	100,00	1.951.230.580	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	%	100,00	201.000.000	100,00	225.803.000	100,00	235.803.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	100,00	276.457.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	86.000.000	6	187.346.000	2	67.346.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	2	25.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	-	-	-	-	2	25.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	15.000.000	2	13.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	2	23.457.000	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	100.000.000	3	25.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100,00	4.413.526.000	100,00	5.516.445.000	100,00	5.516.445.000	100,00	5.967.104.568	100,00	5.967.104.568	100,00	5.967.104.568	100,00	5.967.104.568	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4.359.766.000	34	5.442.248.000	34	5.442.248.000	34	5.892.907.568	34	5.892.907.568	34	5.892.907.568	34	5.892.907.568	
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	1	45.539.500	1	25.539.500	1	25.539.500	1	25.539.500	1	25.539.500	1	25.539.500	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	13.760.000	1	6.295.500	1	26.295.500	1	26.295.500	1	26.295.500	1	26.295.500	1	26.295.500	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	40.000.000	6	22.362.000	17	22.362.000	17	22.362.000	17	22.362.000	17	22.362.000	17	22.362.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	%	-	-	-	-	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	
1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	-	-	100,00	31.756.400	100,00	57.756.400	100,00	57.756.400	100,00	57.756.400	100,00	57.756.400	100,00	57.756.400	
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-			1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	50	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	35	31.756.400	
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-			35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	35	25.000.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitas Administratif Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi		100,00	124.776.800	100,00	336.102.565	100,00	262.810.065	100,00	290.364.065	100,00	290.364.065	100,00	290.364.065	100,00	290.364.065	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.500.500	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	1	14.098.480	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	1	91.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	1	26.176.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	6.669.000	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	1	15.689.585	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.975.000	1	33.051.900	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.992.500	1	16.240.600	1	6.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	3.000.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	1	12.400.000	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	95.639.800	250	153.446.000	12	126.446.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100,00	-	100,00	50.342.115	100,00	50.342.115	100,00	50.342.115	100,00	50.342.115	100,00	50.342.115	100,00	50.342.115	
1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	4	50.342.115	4	50.342.115	4	50.342.115	4	50.342.115	4	50.342.115	4	50.342.115	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-													
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	705.124.782	100,00	893.669.930	100,00	899.528.000	100,00	899.528.000	100,00	899.528.000	100,00	899.528.000	100,00	899.528.000	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.632.782	12	45.000.930	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	105.100.000	12	129.101.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.198.000	1	20.040.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	583.194.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	1	699.528.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100,00	2.007.736.000	100,00	316.130.990	100,00	439.210.400	100,00	649.240.000	100,00	649.240.000	100,00	649.240.000	100,00	649.240.000	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	-	5	114.050.400	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	52.195.000	99	138.970.990	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.955.541.000	2	127.920.000	3	75.920.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	3	49.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	3	69.240.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS	Persentase PSKS yang dibina	%	100,00	642.085.000	100,00	296.978.000	100,00	59.998.500	100,00	282.349.000	100,00	282.349.000	100,00	282.349.000	100,00	282.349.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	32,11	642.085.000	36,12	296.978.000	40,00	59.998.500	45,00	182.349.000	50,00	182.349.000	55,00	182.349.000	60,00	182.349.000	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	4.661.000	30	16.604.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	221.559.000	14	220.608.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	200	405.880.000	250	45.075.500	30	5.000.000	250	54.973.000	250	54.973.000	250	54.973.000	250	54.973.000	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	10	7.569.000	20	12.376.000	50	10.000.000	50	37.376.000	50	37.376.000	50	37.376.000	50	37.376.000	
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	-	-	-	-	5	5.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	-	-	-	-	20	3.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus	Orang	10	2.416.000	15	2.314.000	20	4.998.500	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			Kewenangan Kabupaten/Kota																
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	-	-	-	-	1	5.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	-	-	30	7.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang (1 KUBE 10 orang)	-	-	-	-	5	5.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	-	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	-	-	-	-	14	10.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.02.3.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Teknis Kesejahteraan Sosial Daerah	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	-	-	-	0,00	-	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000		
1.06.02.3.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga	-	-	-	-	-	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000		
1.06.02.3.04	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Terupdatanya Data SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Data SDM Kesejahteraan Sosial yang terupdate	%	-	-	-	0,00	-	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000		
1.06.02.3.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang	-	-	-	-	-	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000		
1.06.02.3.05	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Terupdatanya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Data Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terupdate	%	-	-	-	0,00	-	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1.06.02.3.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	-	-	-	-			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.02.4.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	-	0,00	-	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000		
1.06.02.4.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga	-	-	-			50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000		
1.06.02.4.03.0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	-	-	-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
1.06.02.4.03.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	-	-	-			20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000		
1.06.02.4.04	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Terupdatenya Data SDM Kesejahteraan Sosial	Updating data SDM Kesejahteraan Sosial	Dokumen	1	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1.06.02.4.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang		-		-			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.02.4.05	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Terupdatenya Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Updating data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah	Dokumen	1	-		-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.06.02.4.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga		-		-			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
1.06.03.2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	%		-	100,00	11.925.000	100,00	150.000	100,00	11.232.300	100,00	11.232.300	100,00	11.232.300	100,00	11.232.300	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatnya penangananan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%		-	100,00	11.925.000	100,00	150.000	100,00	3.232.300	100,00	3.232.300	100,00	3.232.300	100,00	3.232.300	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		-	2	11.925.000	5	150.000	5	3.232.300	5	3.232.300	5	3.232.300	5	3.232.300	
1.06.03.3.02	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Persentase Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	%		-	-	-	100,00	-	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	
1.06.03.3.02.0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang		-			5	-	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	
1.06.04.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	11.852.770.000	100	4.483.177.800	100,00	3.475.522.786	100,00	4.201.811.840	100,00	4.201.811.840	100,00	4.201.811.840	100,00	4.201.811.840	
			Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	%	66,60		67,00		68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Fasilitas Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Fasilitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	%	100,00	9.566.012.000	100	4.176.200.000	100,00	2.978.222.786	100,00	3.523.575.925	100,00	3.523.575.925	100,00	3.523.575.925	100,00	3.523.575.925	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	58	54.270.000	280	277.709.000	294	289.200.000	309	300.000.000	324	300.000.000	340	300.000.000	357	300.000.000	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	6.040.000	100	84.150.000	100	85.200.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	43	103.659.800	20	22.870.700	20	30.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	20	34.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	12.964.000	44	30.922.100	44	33.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	44	35.000.000	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1196	341.390.000	815	298.880.800	815	215.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	815	330.000.000	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3630	3.798.490.000	1.867	2.684.325.000	2.179	1.494.400.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	2179	1.644.903.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	9.000.000	150	49.422.000											
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5000	5.070.000.000	180	324.812.100	189	141.000.000	198	358.000.000	208	358.000.000	219	358.000.000	230	358.000.000	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	76	146.108.000	80	153.522.786	84	161.198.925	88	161.198.925	92	161.198.925	97	161.198.925	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	157.468.200	22	87.813.200	23	92.000.000	24	97.000.000	25	97.000.000	27	97.000.000	28	97.000.000	
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	30	3.980.000	36	36.000.000	42	43.800.000	48	43.800.000	54	43.800.000	60	43.800.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	12.730.000	83	165.207.100	85	168.000.000	87	171.000.000	89	171.000.000	91	171.000.000	93	171.000.000	
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			150	52.900.000	157	55.545.000	165	55.545.000	173	55.545.000	182	55.545.000	
1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	-	-			15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	
1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	20.000.000	28	28.000.000	32	28.000.000	36	28.000.000	40	28.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			15	18.000.000	21	25.129.000	24	25.129.000	27	25.129.000	30	25.129.000	
1.06.04.2.01.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	-	-			50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	50	105.000.000	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	orang	100,00	2.286.758.000	100,00	306.977.800	100,00	497.300.000	100,00	678.235.915	100,00	678.235.915	100,00	678.235.915	100,00	678.235.915	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	25	12.535.840	30	12.535.840	35	12.535.840	40	12.535.840	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	25	12.500.075	30	12.500.075	35	12.500.075	40	12.500.075	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	12.500.000	60	15.000.000	65	15.000.000	70	15.000.000	75	15.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	12.500.000	60	15.000.000	65	15.000.000	70	15.000.000	75	15.000.000	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	12	37.852.800	13	10.000.000	14	10.500.000	15	10.500.000	16	10.500.000	17	10.500.000	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	604	250.000.000	100	21.400.000	100	22.500.000	100	23.700.000	100	23.700.000	100	23.700.000	100	23.700.000	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3439	1.658.620.000	1.031	91.725.000	100	5.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			70	41.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	292.500.000			100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	5.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			10	5.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	85.638.000	2	156.000.000	3	163.800.000	3	172.000.000	3	172.000.000	3	172.000.000	3	172.000.000	
1.06.04.2.02.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	
1.06.04.2.02.0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	-	-			200	10.000.000	200	10.500.000	200	10.500.000	200	10.500.000	200	10.500.000	
1.06.04.2.02.0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan	-	-			15	10.000.000	21	31.500.000	24	31.500.000	27	31.500.000	30	31.500.000	
1.06.05.2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial</b>	<b>Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>180.978.000</b>	<b>100,00</b>	<b>437.395.000</b>	<b>100,00</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.530.457.700</b>	<b>100,00</b>	<b>8.530.457.700</b>	<b>100,00</b>	<b>8.530.457.700</b>	<b>100,00</b>	<b>8.530.457.700</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	28,49		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	orang	5	8.398.900	5	42.297.200	120	49.311.700	120	202.414.500	120	202.414.500	120	202.414.500	120	202.414.500	
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.000.000	5	2.675.000	10	5.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	4.984.400	5	6.180.500	10	9.870.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	120	50.000.000	
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	2.414.500	120	33.441.700	120	33.441.700	120	52.414.500	120	52.414.500	120	52.414.500	120	52.414.500	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	-	-			1	1.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Updating Data Fakir miskin	Terupdatenya Data Fakir miskin	Dokumen	12	172.579.100	12	395.097.800	12	75.688.300	12	8.328.043.200	12	8.328.043.200	12	8.328.043.200	12	8.328.043.200	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1.010.996	59.956.800	45.000	310.025.300	45.000	26.655.000	45000	310.025.300	45000	310.025.300	45000	310.025.300	45000	310.025.300	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210.589	60.528.800	45.000	39.999.800											
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	50.000.000	30	42.941.700											
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	2.093.500	10	2.131.000	10	2.805.000	10	2.093.500	10	2.093.500	10	2.093.500	10	2.093.500	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5	-			10	7.674.000	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	30	1.444.866.800	
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengetesan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	210.589	-			45.000	24.190.000	45000	60.528.800	45000	60.528.800	45000	60.528.800	45000	60.528.800	
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			5	5.000.000	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	500	6.410.528.800	
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	-	-			5	9.364.300	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	
1.06.05.3.03	Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Meningkatnya Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Persentase Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP yang tersusun	%	-	-			100,00	5.000.000									
1.06.05.3.03.0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen	-	-			1	5.000.000									

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya kualitas penanganan korban bencana pada pasca bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	38.907.000	100,00	250.000.000	100,00	150.003.814	100,00	224.352.900	100,00	224.352.900	100,00	224.352.900	100,00	224.352.900	
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi	%	100,00	13.810.000	100,00	178.382.000	100,00	65.003.814	100,00	94.102.900	100,00	94.090.400	100,00	94.090.400	100,00	94.090.400	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.950.000	225	51.450.000	250	20.003.814	250	39.102.900	250	39.090.400	250	39.090.400	250	39.090.400	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Orang	20	7.260.000	225	98.550.000	250	15.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota																
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	1.200.000	3	4.586.000											
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000	35	9.864.400	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000	40	13.931.600	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	25.097.000	100,00	71.618.000	100,00	77.500.000	100,00	120.250.000	100,00	120.512.500	100,00	120.512.500	100,00	120.512.500	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	1	6.691.900	1	44.108.100	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota																
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37	18.405.100	40	27.509.900	50	5.000.000	50	5.250.000	50	5.512.500	50	5.512.500	50	5.512.500	
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	-		50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
1.06.06.2.02.0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	-	-	-		30	10.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	
1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	-	-	-		2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	-	-	-		50	5.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga	-	-	-		250	10.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	250	15.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	-	-	-	-	500	5.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	500	10.000.000	
1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	-	-	-	-	2	5.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
1.06.06.2.02.0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	-	-	-	-	223	2.500.000	223	5.000.000	223	5.000.000	223	5.000.000	223	5.000.000	
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	-	-	-	-	1.000	5.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	1000	10.000.000	
1.06.06.4.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	%	-	-	-	-	100,00	7.500.000	100,00	10.000.000	100,00	9.750.000	100,00	9.750.000	100,00	9.750.000	
1.06.06.4.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	-	-	-	-	50	7.500.000	50	10.000.000	50	9.750.000	50	9.750.000	50	9.750.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.07.2	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	33.915.000	100,00	15.000.000	100,00	15.001.500	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100,00	33.915.000	100,00	15.000.000	100,00	15.001.500	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.668.000	1	8.235.000	1	7.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Makam	1	7.327.000	1	6.765.000	1	8.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	19.920.000			1	500	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	
1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang		-			1	500	163	1.000.000	163	1.000.000	163	1.000.000	163	1.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	1	500	20	3.500.000	20	3.500.000	20	3.500.000	20	3.500.000	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		IPG	Indeks	87,37	2.335.500.000	87,45	1.128.660.000	87,50	897.660.002	87,55	1.046.858.650	87,60	1.046.858.650	87,65	1.046.858.650	87,70	1.046.858.650	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak		IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,380		0,380		0,380		0,380		0,370		0,360		0,350		
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai					Nindya (780)		Utama (820)		Utama (850)		Utama (880)		Utama (900)		
2.08.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2.08.02.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kuantitas PUG dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,40	955.000.000	4,20	117.500.000	4,30	112.800.000	4,50	117.925.000	4,60	117.925.000	4,70	117.925.000	4,80	117.925.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	90,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	37.425.000	100,00	41.940.000	100,00	41.940.000	100,00	41.940.000	100,00	41.940.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	7.500.000	1	5.000.000	1	6.625.000	1	6.625.000	1	6.625.000	1	6.625.000	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan/Kota	Dokumen	1	7.000.000	1	7.500.000											
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	38	7.000.000													
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	26	5.000.000													

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	orang	50	7.000.000	50	10.000.000											
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	7.000.000	1	7.500.000	1	5.000.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	5.450.000	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	orang	50	5.000.000	1	7.500.000											
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	7.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	7.440.000	1	7.440.000	1	7.440.000	1	7.440.000	
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			41	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-	-	-	41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	41	8.425.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0,065	255.000.000	0,070	22.500.000	0,072	46.375.000	0,075	46.985.000	0,077	46.985.000	0,080	46.985.000	0,082	46.985.000	
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	30	250.000.000	36	15.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	-	-	-	-	36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	36	12.000.000	
2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-	-	-	36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	36	5.875.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1,00	1.000.000	1	1.610.000	1	1.610.000	1	1.610.000	1	1.610.000	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang	1	5.000.000	1	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	50	7.500.000	
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	57,00	650.000.000	62,00	45.000.000	67,00	29.000.000	72,00	29.000.000	77,00	29.000.000	82,00	29.000.000	87,00	29.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	35	200.000.000	35	10.000.000											
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	350	200.000.000	350	20.000.000											
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	250.000.000	1	15.000.000				1							
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	-	-			25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.03.2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan</b>	<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>%</b>	<b>0,02</b>	<b>367.500.000</b>	<b>0,02</b>	<b>444.850.000</b>	<b>0,02</b>	<b>312.641.002</b>	<b>0,02</b>	<b>416.378.650</b>	<b>0,02</b>	<b>416.378.650</b>	<b>0,02</b>	<b>416.378.650</b>	<b>0,02</b>	<b>416.378.650</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	%	7,50	305.000.000	7,40	124.250.000	7,30	102.280.002	7,20	121.500.000	7,10	121.500.000	7,00	121.500.000	6,90	121.500.000	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	104.250.000											
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20	300.000.000	50	20.000.000											
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	-	-			1	40.000.002	1	59.220.000	1	59.220.000	1	59.220.000	1	59.220.000	
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	-	-			15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	-	-			30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	-	-			1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	1	7.280.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100,00	37.500.000	100,00	223.334.000	100,00	136.620.000	100,00	218.978.650	100,00	218.978.650	100,00	218.978.650	100,00	218.978.650	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	7.500.000	2	8.409.200											

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Layanan	8	30.000.000	11	214.924.800											
2.08.03.2.02.0003	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			14	7.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	14	14.000.000	
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			4	12.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	4	24.000.000	
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	29	43.500.000	
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			6	2.700.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			35	12.250.000	35	27.308.650	35	27.308.650	35	27.308.650	35	27.308.650	
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	55	47.170.000	
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	-	-			60	12.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	60	36.000.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	90,39	25.000.000	100,00	97.266.000	100,00	73.741.000	100,00	75.900.000	100,00	75.900.000	100,00	75.900.000	100,00	75.900.000	Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Kab. Pematang UPTD PPA (1), UPPA (60), Puspaga (1),
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	5.000.000											

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	5.000.000	30	71.270.000											
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	5	7.500.000	12	8.496.000											
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	12.500.000											
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	10	4.400.000	
2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan provinsi	Laporan	-	-			1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	-	-			15	6.200.000	15	8.359.000	15	8.359.000	15	8.359.000	15	8.359.000	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	-	-			223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	223	40.620.000	
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	-	-			2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	2	2.521.000	
2.08.04.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya</b>	<b>%</b>	<b>30,00</b>	<b>440.500.000</b>	<b>35,00</b>	<b>210.000.000</b>	<b>40,00</b>	<b>125.160.000</b>	<b>45,00</b>	<b>203.302.000</b>	<b>50,00</b>	<b>203.302.000</b>	<b>55,00</b>	<b>203.302.000</b>	<b>60,00</b>	<b>203.302.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	%	100,00	228.500.000	100,00	72.000.000	100,00	37.700.000	100,00	68.302.000	100,00	68.302.000	100,00	68.302.000	100,00	68.302.000	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	50	100.000.000	65	47.000.000											
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	3.500.000	1	5.000.000											
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	125.000.000	1	20.000.000											
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	-	-			100	10.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	300	30.000.000	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-			100	10.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dokumen	-	-			35	7.700.000	35	8.302.000	35	8.302.000	35	8.302.000	35	8.302.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100,00	205.000.000	100,00	133.000.000	100,00	52.460.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	125.000.000	1	27.000.000											
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	75.000.000	115	96.000.000											
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000	1	10.000.000											
2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			50	7.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-	-	-	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	45	15.000.000	
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-	-	100	10.460.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	-	-	-	-	100	10.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-	-	-	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	40	10.000.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100,00	7.000.000	100,00	5.000.000	100,00	35.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1	7.000.000	1	5.000.000											
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			50	10.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	-	-			25	5.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.05.2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas data pilah gender	% OPD yang memiliki data gender	%	85,18	14.500.000	88,88	20.000.000	92,59	5.330.000	95,77	13.733.000	97,99	13.733.000	98,00	13.733.000	100,00	13.733.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	50,00	14.500.000	60,00	20.000.000	65,00	5.330.000	70,00	13.733.000	75,00	13.733.000	80,00	13.733.000	85,00	13.733.000	Jumlah OPD 41, jumlah yg memiliki data siga saat ini 25, target pertahun ditambah 2 OPD
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	7.500.000	2	10.000.000											
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	7.000.000	1	10.000.000											
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-			30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	-	-			35	2.330.000	35	2.000.000	35	2.000.000	35	2.000.000	35	2.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	-	-			1	1.000.000	1	9.733.000	1	9.733.000	1	9.733.000	1	9.733.000	
2.08.06.2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	44,39	405.500.000	46,63	168.500.000	48,87	141.400.000	51,12	131.572.000	53,36	131.572.000	56,51	131.572.000	57,58	131.572.000	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelembagaan PHA	%	78,66	382.500.000	80,71	152.500.000	82,95	100.000.000	85,20	100.000.000	87,44	100.000.000	89,69	100.000.000	91,92	100.000.000	Jumlah Lembaga PHA (OPD 41, Dekela 130, DRPPA 46, Organisasi Wanita 35) dibagi (jumlah opd 41, jumlah desa kelurahan 223, jumlah OW 35) dikali 100 persen (target kenaikan per tahun 5 lembaga)

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	25	275.000.000	25	52.500.000											
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	107.500.000	1	100.000.000											
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Orang	-	-			50	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
			Kewenangan Kabupaten/Kota																
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	-	-			25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	25	20.000.000	
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	58,35	23.000.000	64,27	16.000.000	67,26	41.400.000	69,50	31.572.000	71,74	31.572.000	73,99	31.572.000	76,23	31.572.000	Jumlah Dekelra dibagi Jumlah Desa/Kelurahan

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	5.000.000	25	7.000.000											
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	3.500.000											
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000											
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	7.500.000	1	2.500.000											
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	-	-			5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	11.400.000	1	1.572.000	1	1.572.000	1	1.572.000	1	1.572.000	
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	50	5.000.000	
2.08.07.2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>152.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>167.810.000</b>	<b>100,00</b>	<b>200.329.000</b>	<b>100,00</b>	<b>163.948.000</b>	<b>100,00</b>	<b>163.948.000</b>	<b>100,00</b>	<b>163.948.000</b>	<b>100,00</b>	<b>163.948.000</b>	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	40,00	112.500.000	50,00	23.000.000	60,00	35.334.000	70,00	35.334.000	80,00	35.334.000	90,00	35.334.000	100,00	35.334.000	Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Terlaksananya Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KIA Terpadu	Kegiatan	3	7.500.000	1	5.000.000											
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	Orang	100	100.000.000	20	15.000.000											
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Terlaksananya Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat kab/ kota	Dokumen	1	5.000.000	1	3.000.000											

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	-	-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Kegiatan	-	-			2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	-	-			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	-	-			50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	50	11.334.000	
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	-	-			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	50,77	12.000.000	58,46	123.310.000	100,00	128.995.000	100,00	92.614.000	100,00	92.614.000	100,00	92.614.000	100,00	92.614.000	Semua anak yang melapor ke UPTD dan Puspaga mendapatkan layanan komprehensif
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	15	5.000.000	20	3.000.000											
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan	Orang	20	7.000.000	80	120.310.000											
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			41	17.795.000	41	18.314.000	41	18.314.000	41	18.314.000	41	18.314.000	
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			90	18.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			60	22.800.000	30	11.400.000	30	11.400.000	30	11.400.000	30	11.400.000	
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	6	18.100.000	
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	8	4.800.000	
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			90	18.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	45	9.000.000	
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	-	-			14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	14	7.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	-	-			30	22.500.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan	%	71,66	28.000.000	80,00	21.500.000	83,33	36.000.000	85,41	36.000.000	87,50	36.000.000	89,58	36.000.000	91,66	36.000.000	Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Puspaga 1, UPTD PPA 1, PATBM 46
2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di Tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	Lembaga	2	7.500.000	2	3.000.000											
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	1	7.500.000	1	5.500.000											
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	30	7.500.000	30	7.500.000											

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	2	2.500.000	2	2.500.000											
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	-			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-			1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan	Lembaga	-	-			5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
			sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)																
2.08.07.2.03.0012	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
2.08.07.2.03.0014	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	-	-			50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,25	14.088.928.418	1,23	18.247.651.000	1,22	17.890.900.000	1,21	14.247.651.000	1,20	18.247.651.000	1,19	18.247.651.000	1,18	18.247.651.000	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk		TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,18		2,12		2,11		2,10		2,10		2,10		2,10		
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	62,77		63,60		64,29		65,05		65,80		66,56		67,32		
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	64,30		65,30		66,30		67,30		68,30		69,30		70,30		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	17,50	9.365.723.693	17,20	9.554.057.000	16,50	9.031.852.000	16,10	5.554.057.000	15,70	9.554.057.000	15,30	9.554.057.000	14,90	9.554.057.000	
		Persentase pemetaan dan pengelolaan data pengendalian penduduk, yang mencakup pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara menyeluruh di	Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		(Kampung KB Mandiri)

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		wilayah kabupaten/kota																	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase dokumen kebijakan pengendalian penduduk yang disusun sesuai amanat	%		-		-	100,00	100.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	0	-	-	-	1	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	-	-	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP	%	100,00	9.365.723.693	100,00	9.554.057.000	100,00	8.931.852.000	100,00	5.504.057.000	100,00	9.504.057.000	100,00	9.479.057.000	100,00	9.479.057.000	
2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	9.365.723.693	1	9.554.057.000	1	8.931.852.000	1	5.504.057.000	1	9.504.057.000	1	9.479.057.000	1	9.479.057.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,75	3.153.733.000	70,75	7.819.654.000	70,85	6.610.808.000	70,95	7.819.654.000	71,05	7.819.654.000	71,15	7.819.654.000	71,25	7.819.654.000	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,78		9,68		9,58	-	9,48	-	9,38		9,28		9,18		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pelaksanaan advokasi dan KIE KKBP	%	100,00	3.100.000	100,00	200.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	100,00	250.000.000	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	3.100.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%	100,00	5.000.000	100,00	119.700.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	5.000.000	1	119.700.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70,36	3.138.861.000	70,43	6.185.554.000	70,50	6.060.808.000	71,07	7.269.654.000	71,14	7.269.654.000	71,21	7.269.654.000	71,28	7.269.654.000	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	8.920.000	6	15.000.000	4	18.000.000	4	21.600.000	4	21.600.000	4	21.600.000	4	21.600.000	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	10	6.385.000	304	108.456.000	10	130.147.200	10	156.176.640	10	156.176.640	10	156.176.640	10	156.176.640	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	3.935.000	1	17.000.000	1	20.400.000	1	24.480.000	1	24.480.000	1	24.480.000	1	24.480.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	12.230.000	2	130.000.000	1	156.000.000	1	187.200.000	1	187.200.000	1	187.200.000	1	187.200.000	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	3.063.861.000	10	5.719.654.000	14	5.501.728.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	14	6.598.758.000	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	350	43.530.000	1.470	195.444.000	14	234.532.800	14	281.439.360	14	281.439.360	14	281.439.360	14	281.439.360	
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	0	-	-	-	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB	%	100,00	6.772.000	100,00	1.314.400.000											

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	5.000.000	5	1.314.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung		1.772.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera</b>	<b>Pesentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.569.471.725</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.248.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	
2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Peresentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.559.331.725</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.248.240.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	<b>100,00</b>	<b>873.940.000</b>	
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1	48.239.025													

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
					2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	
		Keluangan Keluarga)																	
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	-	-	-	-	2	60.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	-	-	-	-	14	98.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	-	-	-	-	1	120.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	25	306.500.000	15	195.000.000	20	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	30	195.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	4188	503.910.000	222	222.000.000	223	320.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	223	222.000.000	
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	-	-	-	-	100	20.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	5	622.080.000	4	425.940.000	4	425.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	4	215.940.000	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	222	76.600.000	223	31.000.000	225	74.500.000	225	31.000.000	225	31.000.000	225	31.000.000	225	31.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	-	-	-	-	1	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	-	-	-	-	1	120.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	51	2.002.700													
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting	%	100,00	10.140.000	-	-	100	654.800.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	100,00	95.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	-	-	-	-	1	77.400.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	-	-	-	-	1	442.400.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	-	-	-	-	1	60.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	10.140.000			1	75.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
2.14.04.3.03	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Persentase remaja yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR	%					100,00	130.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	

KODE REKENING	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET DAN PAGU INDIKATIF								KET		
					2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.		KINERJA	Rp.
2.14.04.3.03.0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan					1	130.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

Dukungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung  
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li>   <li>➤ Program Perlindungan Perempuan</li> </ul>	<p>Meningkatnya Kualitas dan PUG dan pemberdayaan Perempuan</p> <p>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan</p>	<p>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</p> <p>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</li>   <li>a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah</li> </ul>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	➤ Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	➤ Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS	Persentase PSKS yang dibina	a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota c. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial d. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah e. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota f. Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Rehabilitasi Sosial</li> </ul>	Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</li> <li>b. Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah</li> <li>a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li> <li>b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> </ul>	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan</li> <li>b. Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li> <li>b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</li> <li>d. Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP</li> </ul>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			perlindungan dan jaminan sosial		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Program Pengendalian Penduduk</li> <li>➤ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> </ul>	<p>Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk</p> <p>Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana</p>	<p>a. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>b. Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)</p> <p>a. Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR</p> <p>b. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</p>	<p>a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>➤ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</p>	<p>Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera</p>	<p>Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif</p>	<p>Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>c. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</p>	

Tabel 4.4  
Daftar Kegiatan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

NO (1)	PROGRAM UNGGULAN (2)	PROGRAM (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR PROGRAM (5)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (6)	KET. (7)
1	➤ Santunan Kematian @ Rp. 3.000.000,00	➤ Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial	a. Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan b. Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

Selain Program Prioritas yang mendukung Daerah, serta Program Unggulan yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga mendukung Program Sekolah Rakyat dimana Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI berupaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan menghadirkan Sekolah Rakyat. Program sekolah gratis berasrama ini dirancang agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan layak, karakter kuat, dan keterampilan hidup untuk masa depan yang mandiri.

Sekolah Rakyat adalah program strategis dan prioritas nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Prinsipnya sederhana, semua anak Indonesia harus bersekolah, baik kaya maupun miskin. Dan di sinilah negara hadir, menjemput bola untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa sekolah.

Program ini mengusung konsep sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap mulai dari ruang belajar, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, hingga pelatihan vokasi. Mereka juga dibimbing dan didampingi guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan selama 24 jam. Kurikulumnya tak hanya mencakup kemampuan kognitif, tapi juga kecerdasan karakter, dan life skill.

Presiden ingin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya tiga hal. Cerdas, berkarakter, baik karakter kebangsaan, keagamaan, maupun sosial, dan terampil. Jadi, kalau mereka belum ingin kuliah setelah lulus SMA, mereka bisa langsung bekerja membantu keluarga.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat memiliki hubungan yang erat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan dan perlindungan sosial. Berikut beberapa contoh hubungan antara Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat:

- Kerjasama Program: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat dapat bekerja sama dalam program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan masyarakat, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan anak.
- Pelayanan Sosial: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat memberikan pelayanan sosial kepada siswa dan keluarga yang membutuhkan, seperti bantuan biaya sekolah, bantuan makanan, dan pelayanan kesehatan.
- Pengawasan dan Perlindungan: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pemalang dapat bekerja sama dengan sekolah rakyat dalam pengawasan dan perlindungan anak, seperti identifikasi anak yang berisiko menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.

- Pemberdayaan Masyarakat: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat dapat bekerja sama dalam pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan masyarakat.
- Penggalangan Dana: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat dapat bekerja sama dalam penggalangan dana untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan masyarakat.

Dengan kerja sama yang erat, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dan sekolah rakyat dapat meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### **4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih

jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Penetapan Indikator Kinerja Utama  
DinsosKBPP Kabupaten Pemalang Kabupaten  
Pemalang Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama DinsosKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase PPKS yang ditangani	%	74,22	66,60	68,00	70,00	72,00	73,00	75,00	75,00	75,00
2	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	% KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja Utama DinaoaKBPP Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	IKM	Nilai		86,00	86,10	86,15	86,20	86,25	86,30	86,35	86,35
5	SAKIP	Nilai	-	65,00	65,10	65,15	65,20	65,25	65,30	65,35	65,35
6	IPG	Indeks	87,14	87,37	87,45	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,70
7	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,378	0,380	0,380	0,390	0,380	0,370	0,360	0,350	0,350
8	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (850)	Utama (880)	Utama (900)	Utama (900)
9	LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,27	1,25	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,18
10	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,19	2,18	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
11	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	62,08	62,77	63,60-64,81	64,29-64,32	65,05-65,10	65,80-65,87	66,56-66,64	67,32-67,41	67,32-67,41
12	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	-	64,30	65,10	65,90	66,70	67,50	68,30	69,10	69,10

#### 4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial,**  
**Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan**  
**Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang**  
**Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,40	5,40	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8
4.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 pddk prpuan		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline Tahun		Target Capaian						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,19	2,18	2,12	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
7.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,11	70,75	70,75	70,85	70,95	71,05	71,15	71,25	71,25
8.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,27	9,78	9,68	9,58	9,48	9,38	9,28	9,18	9,18

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, verifikasi rancangan dengan Bappeda, reviu Inspektorat, serta verifikasi akhir dengan Bappeda. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang saja, namun juga *stakeholder* terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, melalui Sekretariat, Bidang dan UPTD PPPA Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Provinsi Kabupaten Pemalang.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pemenuhan ASN dengan usulan sesuai formasi yang dibutuhkan;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
4. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini, mendukung tercapainya visi **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**.

Pemalang, September 2025  
Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Pemalang Kabupaten Pemalang,



Drs. MU'MINUN, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680526 199403 1 005